

KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN BUNGO

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah perpanjangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah sebagai azas desentralisasi, Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari berangasa dan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat Pemerintah Daerah diberi kewenangan melaksanakan program pembangunan daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah UU No. 32 Tahun 2004, termasuk didalamnya mengatur, pengendalian perekonomian di daerah. Menurut Rossen & Gayer (2008:47-49) salah satu peran penting pemerintah adalah membuat keputusan terkait alokasi sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang publik. Artinya pemerintah sangat berperan strategis terhadap kebutuhan ekonomi maupun barang publik lainnya bagi masyarakat.

Sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam pembangunan ekonomi dapat di *review* beberapa Indikator : Kinerja Ekonomi dapat dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Pengangguran, Kemiskinan,

Inflasi dan Gini Rasio (*macro economics*). Pertumbuhan Ekonomi diatas 4 persen per tahun namun beberapa tahun terakhir kecenderungan terus melambat pada Tahun 2023 menjadi 4,66 persen dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 5,99 persen. Pengecualian di masa pandemi covid-19 yang hampir setiap daerah mengalami pertumbuhan yang melambat diangka 0,48 persen bahkan secara nasional mengalami defisit .

Angkatan kerja dan pengangguran hal yang tidak bisa dipisahkan dari ekonomi secara makro karena angkatan kerja mencerminkan seberapa banyak orang bekerja dan menerima upah/pendapatan, akan memengaruhi sisi belanja dan mempengaruhi sektor produksi. Angkatan Kerja Pada Tahun 2023 yaitu sebesar 196.264 jiwa dan bekerja sebanyak 94,77 persen, dengan angka pengangguran sebesar 10.265 Jiwa atau 5,23 % penduduk Kabupaten Bungo menganggur, dengan berbagai macam permasalahannya. Ketika orang menganggur artinya orang tersebut dapat dikatakan tidak memiliki penghasilan, dengan demikian akan mengurangi tingkat permintaan terhadap barang dan jasa. Angka pengangguran yang masih tinggi mengindikasikan bahwa masih besarnya masyarakat Kabupaten Bungo yang belum dapat hidup layak atau belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (*household consumption*), hal itu akan berdampak kepada masalah sosial dan kriminal.

II. PEMBAHASAN

Kabupaten Bungo selama lima tahun terakhir dengan pertumbuhan Ekonomi 2019-2023 (BPS,2023), bertumbuh diatas 4 persen dan dibawah 5

persen stabil di 4 %. Pengecualian pada Tahun 2020 pasca Covid-19 namun tiga tahun terakhir berturut-turut pada kecenderungan melembat sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel . 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo 2019-2023

2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
4,19	0,48	4,99	4,73	4,66

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo tiga Tahun terakhir 2021-2023 sebesar 4,99 % melambat menjadi 4,66 % Tahun 2023 bila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo 2019-2023, ada 7 (tujuh) item Lapangan Usaha (LU) yang signifikan mengalami perlambatan yaitu :

1. Pertanian/Kehutanan dan Perikanan selama 2 tahun terakhir mengalami perlambatan dari 24,22 % Tahun 2022 melambat 23,68 % pada Tahun 2023.

Peningkatan produksi pertanian/Kehutanan dan Perikanan sangat berkorelasi dengan harga jual. Untuk produksi dari perkebunan Kelapa Sawit dan Karet harga jual ditentukan oleh pasar Global dan Domestik, ketika produksi melimpah maka perusahaan akan menurunkan harga disamping pasar Dunia juga menentukan. Untuk Harga Kelapa Sawit rata-rata dua tahun terakhir di tingkat petani Rp. 1.800/kg s/d Rp. 2.000,-/kg dan karet Rp. 8.000 s/d 10.000 kg.

Sementara untuk produksi pertanian tanaman pangan seperti sayur-sayuran sring kali over produksi jika hal ini terjadi, harga produksi masyarakat anjlok petani lokal merugi dan petani tidak lagi menanam komoditas yang sama. Pada Komuditas Cabe dan hasil peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bungo belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi permintaan pasar Kabupaten Bungo baik dari peternakan besar seperti sapi maupun ternak ayam dan telur termasuk perikanan. Sektor ini dikuasai oleh pedagang dari luar daerah dari Sumatera Barat, Jawa Palembang dan Kabupaten Tetangga hanya sebagian kecil saja yang komoditas atau dihasilkan dari Kabupaten Bungo, oleh karena itu Kabupaten Bungo akan rentan terjadi inflasi untuk komoditas tersebut kecuali sayur-sayuran. Faktor ini juga membuat masyarakat kurang tertarik untuk berprofesi sebagai petani sayur-mayur, kecuali petani cabe profesi ini sedikit orang yang mau terjun karena memerlukan modal relatif besar dan *skil* khusus.

2. Pertambangan dan Penggalian Tahun 2022 sebesar 23,74 % melambat menjadi 20,30 % pada Tahun 2023.

Petambangan dan Penggalian untuk sektor ini harus diakui bahwa kebijakan Pemerintah Pusat menarik Izin Pertambangan seperti Batu Bara dan Penggalian lainnya sangat berpengaruh terhadap produksi, sehingga Investasi terhadap Pertambangan turun drastis, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Bungo terutama dari pekerja kasar seperti supir, pekerjaan lapangan lainnya.

3. Konstruksi sebesar 13,39 % pada Tahun 2019 melambat menjadi 10,68 Tahun 2023.

Sektor Konstruksi hal ini erat kaitannya dengan pasar lokal/regioanal serta *Government spending* atau belanja pemerintah. Ketika pasar di Kabupaten Bungo bergairah maka investasi terhadap konstruksi seperti pembangaunan Gedung Swasta/pertokoan akan meningkat sehingga banyak menyerap lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja dari penyediaan materi bangunan, pertukangan dan tenaga ahli konstruksi, bila pasar lesu dan Invesatasi turun maka sektor konstruksi mengikuti hal yang sama.

4. Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,90 Tahun 2020 melambat sebesar 14,95 % Tahun 2023.

Perdagangan Besar/Eceran/Reparasi Mobil dan Motor hal ini erat kaitanya dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat dan *Demand and Suplay* atau hukum pasar. Bila mana masyarakat memiliki banyak uang maka kecenderungan untuk berbelanja akan tinggi, baik itu barang konsumtif maupun barang pelengkap. Pedagang Besar dan Eceran/Reparasi Mobil dan Motor itu merupakan barang yang sifat koplementer masyarakat berbelanja sektor ini ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, jadi lesunya pedagang besar dan Eceran tidak terlepas dari perekonomian masyarakat yang menurun.

5. Informasi dan Komunikasi sebesar dari 5,90 % pada Tahun 2020 melambat 4,75 % Tahun 2023

Sektor Informasi dan Komunikasi yang mengalami Perlambatan menurut pandangan penulis hal itu disebabkan oleh banyaknya kemudahan dalam berkomunikasi dan informasi dari berbagai media layanan yang disediakan oleh media sosial seperti *WhatsUp/Facebook/Instegram* dan lain sebagainya. Kemudahan dalam berkomunikasi yang ditawarkan oleh jasa swasta memberikan keuntungan efiseinsi dan keuntungan *financial* yaitu terjadinya penghematan pengeluaran uang bagi masyarakat. Sementara itu untuk jasa penjualan pulsa/paket data dengan mudah melalui aplikasi/Banking, hal ini memberi andil menurunnya penjualan *direc* kepada konsumen di daerah ini.

6. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial dari 4,76 % pada Tahun 2019 melambat sebesar 3,39 % pada Tahun 2023,

Perlambatan dari Sektor Adminstrasi Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial, hal ini dalam pandangan atau analisa penulis beberapa tahun terakhir Pos tertentu belanja Pemerintah daerah mengalami pengurangan untuk kesimbangan fiskal pemerintah daerah. Disisi lain Pemerintah daerah banyak mengalokasi anggran untuk belanja barang dan jasa seperti pembelian kendaraan Dinas Roda Empat dan belanja kegiatan perjalanan dinas.

7. Jasa Pendidikan dari angka 5,10 % pada Tahun 2019 melambat menjadi 4% pada Tahun 2023.

Sektor atau Lapangan Usaha (LU) dari jasa pendidikan yang mengalami perlambatan dari 5,10 % 2019 ke 4 % pada Tahun 2023, hal ini disebabkan pendapatan masyarakat sebagian besar menurun utamanya adalah para petani Karet dan Buruh Tani, sebagaimana besar masyarakat Kabupaten Bungo berpendapatan rendah, pendapatan perkapita Kabupaten Bungo yang meningkat, hal ini tidak dapat sepenuhnya dijadikan dasar penilaian kecukupan kebutuhan, karena pendapatan perkapita perhitungannya hanya membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kepada setiap masyarakat, sementara yang berpendapatan lebih di akumulasi dengan berpendapatan rendah, tentu tidaklah merata untuk pengukuran ketimpangan harus dilihat dari *Gini Ratio* .

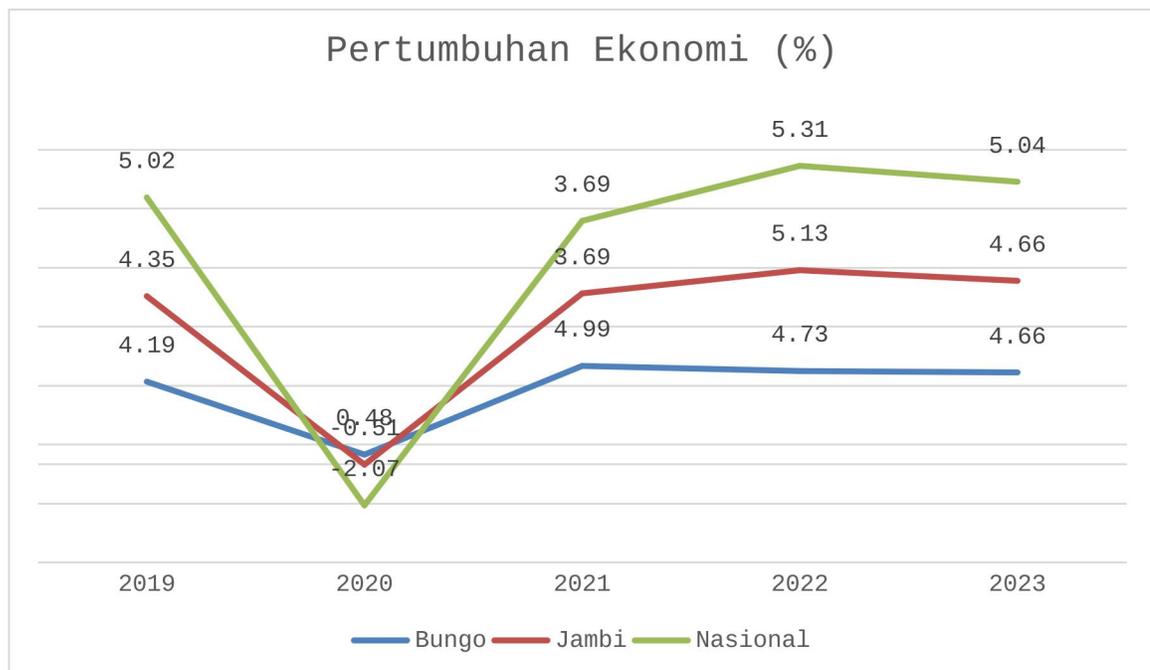
Tabel 2.2. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66

Tabel 2.3. Pertumbuhan ekonomi Nasional 2019-2023

2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Gambar.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan



Dari grafik diatas terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo mulai melambat pada Tahun 2022 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, namun tidaklah begitu signifikan. Apa yang menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo Tahun 2022 dari tahun 2023 yaitu item Lapangan Usaha (LU) yang signifikan **pertama** dari Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang turun dari 24,22 persen ke 22,31 6,65 persen. **Kedua** dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan dari 6,65 persen ke 5,84 persen. **Ketiga** Konstruksi dari 12,29 persen turun ke 10,45 persen. **Keempat** perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, **Kelima** Informasi dan Komunikasi dari 5,33 menjadi 4,67 dan **Keenam** Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Pada sisi lain dari Lapangan Usaha (LU) yang naik tetapi signifikan pada Tahun 2023 adalah dari Lapangan Usaha (LU) **Pertama** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari 22,1 persen menjadi 23,68 persen. **Kedua** Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 13,61 persen ke 14,95 persen, ada beberapa Lapangan Usaha lainnya yang naik namun tidak signifikan, selebihnya terdapat kenaikan pada Tahun 2023 tidak signifikan dan pada kecenderungan melambat dan tidak naik atau bertumbuh.

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara komprehensif selama lima Tahun yaitu 2023 banyak topang atau didongkrak dari **pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 16,84 persen**, hal ini tidak lepas dari Provinsi Jambi

khususnya Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi memiliki banyak perusahaan. Kabupaten Bungo yang merupakan bagian dari Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Sejuahmana peran Kabupaten Bungo dalam perekonomian Provinsi jambi, dapat dilihat dari Produk Demestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun 2019-2023.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Bungo 2019-2023.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tabel Lapangan Usaha Kabupaten Bungo 2019-2024.

Kategori Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,53	23,89	24,22	22,31	23,68
B	Pertambangan dan Penggalian	14,40	9,57	13,80	23,74	20,30
C	Industri Pengolahan	5,95	6,66	6,65	5,84	5,96

D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,06	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,20	0,19	0,16	0,18
F	Konstruksi	13,31	13,39	12,29	10,45	10,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,90	15,91	15,22	13,61	14,95
H	Transportasi dan Pergudangan	2,59	2,46	2,28	2,13	2,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,79	2,69	2,47	2,18	2,27
J	Informasi dan Komunikasi	5,29	5,90	5,33	4,67	4,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,94	4,40	4,36	3,77	3,68
L	Real Estate	2,72	2,84	2,57	2,30	2,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,21	0,21	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	4,93	4,18	3,38	3,39
P	Jasa Pendidikan	5,10	5,54	4,90	4,11	4,07

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,74	0,75	0,60	0,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,58	0,59	0,53	0,47	0,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3. Tenaga kerja Kabupaten Bungo 2019-2023.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting selain sumber daya alam, modal dan teknologi, perpaduan/kombinasi antara tiga variabel tersebut akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Peran tenaga kerja sangatlah strategis oleh karena itu perkembangan tenaga kerja harus menjadi perhatian pemerintah, karena faktor inilah yang mendorong kemajuan perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.3. Perkembangan Tenaga Kerja Kabupaten Bungo 2019-2023.

2019	2020	2021	2022	2023
172.645	179.151	178.842	194.319	196.264

Gambar 2. Tenaga Kerja kabupaten Bungo



Berdasarkan dari gambar 2. diatas bahwa angkatan kerja Kabupaten Bungo sejak Tahun 2022 dan meningkat signifikan yaitu sebesar 196.264 jiwa pada tahun 2023 dan bekerja sebanyak 94,77 persen, dengan angka pengangguran sebesar 10.265 Jiwa (5,23 %). Hal sebagai dampak dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan pasca Covid-19 yang banyak mengalami PHK atau menutup usaha kembali ke Kabupaten Bungo dari Perantaun.

Sementara peningkatan tenaga kerja dari Tahun 2022-2023 tidak terlalu signifikan namun penambahan tenaga kerja telah hlebih daulu naik signifikan sejak tahun 2022. Artinya banyak masyarakat Kabupaten Bungo yang membutuhkan pekerjaan sementara lapangan pekerjaan sangat terbatas, untuk bekerja diperusahaan yang relatif besar tidaklah mudah jika tidak memiliki jaringan atau koneksi. Oleh karena itu sebagai subsitusi pekerjaan sebagai pendompeng atau Penambang EmasTanpa Izin (PETI), karena untuk menjadi Penambang Emas tidak memerlukan *skill* lebih, sedangkan tenaga kerja yang

lainya kembali tetap menjadi buruh tani atau sebagai penggeres karet meskipun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pilihan lain.

Bagi Tenaga kerja yang berpendidikan S1 dan SLTA, yang tidak punya *skill* dasar baik teknologi maupun IT/digitat akan sulit mendapatkan pekerjaan karena memilih pekerjaan yang *perfec* dan upah tinggi. Tenaga kerja inilah yang banyak menganggur yang menjadi beban orang tua maupun pemerintah yang musti dipikirkan oleh Pemerintah daerah. Semakin banyak orang menganggur akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran akan menggrus pendapatan orang lain dan dana pemerintah seperti BJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

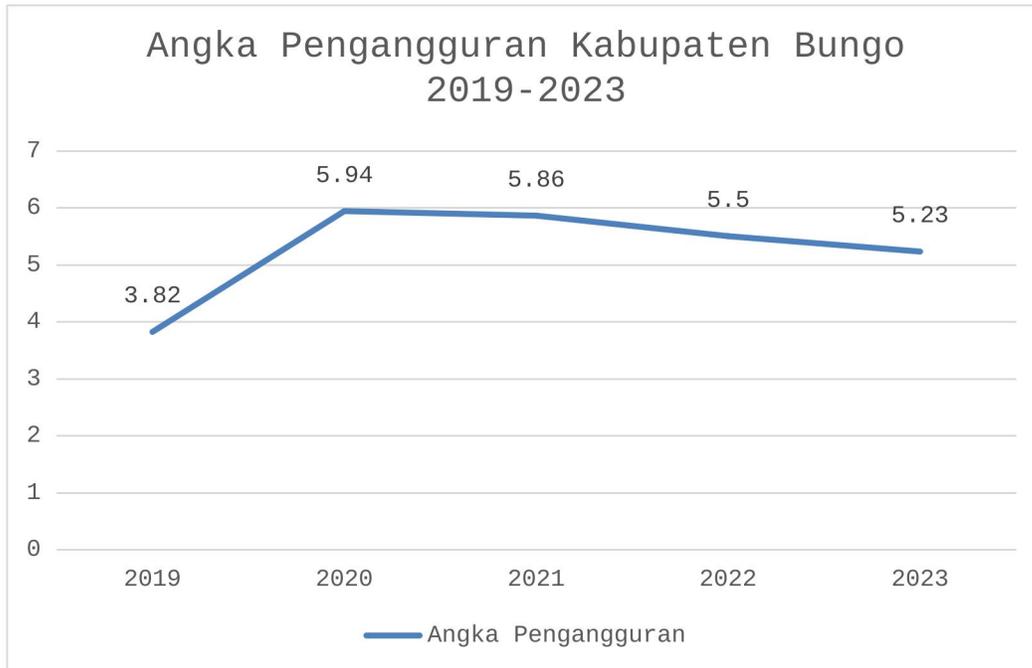
2.4. Angka Pengangguran Kabupaten Bungo 2019-2023

Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena, adanya pengangguran maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, untuk melihat perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bungo sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Angka Pengangguran Kabupaten Bungo 2019-2024

2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
3,82	5,94	5,86	5,50	5,23

Gambar 3.



Angka pengangguran di Kabupaten Bungo selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuatif, terjadi lonjakan pada Tahun 2020 namun pada tahun 2022 kecenderungan tren yang menurun meskipun tidak signifikan sampai dengan akhir 2023 dari 5,50 persen menjadi 5,23 persen. Lonjakan angka pengangguran ini terjadi sebagai akibat covid,19 dari pemberlakuan *fisikal Social Distancing* dan dengan vakumnya kegiatan perusahaan/ berhentinya beberapa sektor produksi. dilihat dari angka pengangguran Tahun 2020 yaitu sebesar 10,634 jiwa atau sebesar (5,95 %), angka pengangguran di Kabupaten Bungo Tahun 2022 sebesar 5,50 % dan tahun 2023 turun 5,23 % namun bila dikomparasikan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan pada dua tahun terakhir.

Peningkatan angka Pengangguran akan terus bertambah seiring dengan kelulusan SLTP, SLTA maupun sarja (S1) yang terus bertambah. Apa yang dapat

dilihat dari pergerakan angka pengangguran Kabupaten tersebut, bahwa pemerintah kabupaten Bungo belum dapat menurunkan angka yang signifikan masih berada diatas 5 persen rata-rata selama Tiga Tahun terakhir. Penyerapan tertinggi tenaga kerja di Kabupaten Bungo berdasarkan Lapangan Usaha (LU) utamanya adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, disusul oleh Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi dan pedagang Eceran, Reparasi Mobil dan Motor Keempat faktor tersebut turun maka dapat dipastikan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bungo menurun dan berimplikasi kepada peningkatan angka pengangguran.

Mari kita lihat dari latar belakang pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Bungo adalah tamatan SD, SMP dan SLTA yang relatif sedikit sekali memiliki keahlian lebih dibidangnya, sebagian besar hanya bisa menjadi tenaga pekerja kasar.

- a. Ketika sektor pertambangan turun atau tidak banyak beraktifitas di Kabupaten Bungo, maka angka pengangguran meningkat, karena sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bungo adalah sebagai pekerja rutin yang tidak memerlukan keterampilan khusus atau penggunaan teknologi.
- b. Sektor Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan turun juga akan sangat berdampak langsung terhadap penurunan penyerapan lapangan pekerjaan, hal tersebut didasari oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo banyak bekerja di sektor perkebunan, baik perkebunan Kelapa Sawit maupun perkebunan karet.

- c. Sektor Konstruksi di Kabupaten Bungo sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah, ketika pemerintah banyak berbelanja (*Government Spending*) atau membangun infrastruktur, maka akan terjadinya penyebaran uang melalui *payment of labor wages*. Dan belanja konstruksi lainnya yang kesemuanya akan berdampak terhadap meningkatnya perputaran uang di *market* Kabupaten Bungo

Sektor konstruksi selama lima tahun terakhir sejak 2019 sampai dengan 2023 pada kecenderungan yang menurun dari 13,3 persen turun diangka 10,6 persen pada tahun 2023. Kenapa belanja pemerintah sektor konstruksi turun/melambat, hal ini ada korelasi Anggaran pemerintah Kabupaten Bungo yang mengalami defisit sejak Tahun 2019 sampai dengan 2022. Defisit Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk membiayai sektor sosial sebagai tanggap darurat Covid'19. Sebagaimana teori klasik menyatakan bahwa salah satu faktor pertumbuhan ekonomi itu di pengaruhi oleh konsumsi/belanja pemerintah.

2.5. Inflasi/*Inflation*.

Inflasi adalah kenaikan harga barang yang disusul oleh kenaikan barang lainnya dan berkelanjutan (kontinyu). Kenapa inflasi menjadi perhatian oleh banyak orang baik masyarakat maupun pemerintah, karena inflasi yang tidak terkendali akan menggerus pendapatan masyarakat secara umum. Pemerintah berkewajiban menjaga inflasi, inflasi yang tidak terkendali akan menjadi masalah sosial dan keresahan di masyarakat bila tidak ditangani dengan baik dapat, akan

menggerus pendapatan masyarakat pada gilirannya menurunkan daya beli konsumen.

Untuk melihat pergerakan perekonomian di Kabupaten Bungo, salah satunya adalah pengaruh Inflasi, inflasi dipicu oleh peningkatan income masyarakat langkanya barang dan naiknya biaya produksi. Inflasi yang terkendali atau seimbang pada sisi biaya produksi dan harga jual akan dapat mendorong Pertumbuhan ekonomi, inflasi yang diharapkan adalah inflasi yang tetap berada dibawah pertumbuhan ekonomi, dimana pendapatan masyarakat tidak semuanya habis untuk kebutuhan belanja (konsumsi) dan dapat menyisihkan pendapatannya/saving yang dapat dipergunakan untuk investasi maupun kebutuhan lainnya dkemudian hari.

Tabel II.4 Inflasi di Kabupaten Bungo 2019-2023.

2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
2,61	2,32	1,65	6,04	2,85

Inflasi Kabupaten Bungo Bulan Januari Tahun 2024 (y on y) 2,42 % dan Februari 2,81 %. Dari perkembangan inflasi *month to month* inflasi di Kabupaten pada tren yang naik meskipun tidak signifikan, namun sampai dengan akhir tahun 2024 angka inflasi Kabupaten Bungo di prediksi akan mencapai 3,2 % sampai dengan 5,3 %, inflasi tertinggi diperkirakan akan terjadi pada Bulan Juli

dan Agustus dimana cuaca akhir-akhir ini tidak menentu baik di daerah Kabupaten Bungo maupun skala regional sebagai pemasok bahan pokok seperti beras, telur, ayam potong cabe dan sayur-sayuran di Kabupaten Bungo sebagian besar di datangkan dari luar daerah. Sementara dengan turunya dana BLT dan Bantuan Pemerintah Pusat dan *government spending* akan meningkatnya peredaran uang di Kabupaten Bungo sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat sejalan dengan peningkatan *income*. Inflasi yang ideal berada diangka 2 % sampai dengan 3,5 %.

Inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik untuk perekonomian karena akan menurunkan produksi terutama yang di produksi oleh masyarakat lokal akan berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat kecil seperti petani dan pedagang sayur-sayuran, Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan inflasi pada kondisi yang ideal khususnya di Kabupaten Bungo. Dimana titik inflasi ideal yang mesti ditoleransi yaitu memperhitungkan antara tingkat kemampuan daya beli masyarakat dengan keuntungan (*profit*) yang didapatkan oleh produsen karena pemerintah juga harus melindungi produsen agar tetap *exist*.

2.6. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bungo 2019-2023

Pengeluaran Perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat karena dengan semakin tingginya pengeluaran masyarakat maka tingkat kesejahteraannya pun dianggap meningkat, karena semakin terpenuhinya kebutuhan. Ketika pendapatan meningkat kecenderungan

orang untuk cenderung orang berbelanja akan meningkat pula. Untuk melihat pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. -Pengeluaran perkapita Kabupaten Bungo Atas Harga Berlaku 2019-2023.

2019	2020	2021	2022	2023
34.011.304,88	34.468.389,93	35.793.436,46	36.976.719,23	38.189.121,05

Dari tabel ini pengeluaran Perkapita Kabupaten terus mengalami peningkatan khususnya pada Tahun 2022-2023 namun bila diproyeksi dengan daya beli masyarakat yang cenderung menurun, tercermin dari beberapa Lapangan Usaha (LU) di Kabupaten Bungo ada ketidak linier antara peningkatan pengeluaran perkapita dengan kemampuan daya beli masyarakat, ini perlu menjadi perhatian pemerintah apakah peningkatan perkapita itu merata ? lihat data *gini ratio*, utamanya bagi kalangan menengah kebawah PR ini adalah kewajiban Pemerintah untuk membuat program-program yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat lemah/kecil karena kelompok populasi ini yang paling besar.

2.7. Tabungan Masyarakat di Perbankan Kabupaten Bungo Bank Umum/BPR

Tingkat tabungan masyarakat di perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan dan perputaran uang di daerah Kabupaten Bungo apakah termasuk tinggi atau sebaliknya, karena hal itu akan menggambarkan salah satu tingkat perekonomian masyarakat, disamping itu peran tabungan akan mendorong investasi melalui kredit yang dikucurkan oleh perbankan. Tabungan masyarakat pada bank Umum/BPR Tahun 2019 dengan nominal sebesar 2,22 M dengan mencapai angka peningkatan tertinggi pada Bulan Oktober 2022 sebesar 2,98 M, namun diawal Tahun 2023 sampai dengan Desember 2023 terjadi penurunan saving diangka 2,7 M Kabupaten Bungo adalah penabung atau penyimpan tertinggi ke 2 setelah Kota Jambi.

Tingkat tabungan masyarakat di perbankan Kabupaten Bungo mencerminkan bahwa masih relatif baiknya *moneter* di Kabupaten Bungo hal ini merupakan kuasa pemilik modal yang lebih memilih menyimpan uang diperbankan, dengan masih relatif tingginya tabungan masyarakat menunjukkan ada kelebihan uang yang dimiliki masyarakat. Pertama masyarakat menginginkan adanya saving sebagai bentuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mendesak. Kedua mengindikasikan bahwa berinvestasi di Kabupaten Bungo masih belum begitu menarik

Faktor lain tingkat suku bunga simpanan di perbankan yang relatif masih tinggi, jika suku bunga simpanan lebih menguntungkan dari pada berinvestasi maka pemilik modal akan cenderung menyimpan uangnya diperbankan, disinilah peran pemerintah harus mampu memberikan *Investment Oportunity* serta meyakinkan kepada pemilik modal/publik bahwa Kabupaten Bungo menarik bagi

Investasi dengan bukti fisik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dari jasa tenaga maupun dari pajak daerah.

2.8. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023.

Kredit yang diberikan Bank Umum kepada masyarakat untuk UMKM di Kabupaten Bungo Tahun 2019 adalah sebesar 1,697 M dan pada Tahun 2023 sampai dengan kondisi Agustus 2023 sebesar 2,335 M.

Berdasar Data Bank Indonesia Provinsi Jambi September 2023 tersebut dapat dimaknai bahwa Tabungan Masyarakat Kabupaten Bungo di Perbankan Umum masih jauh lebih tinggi dari kredit yang disalurkan oleh Perbankan. Hal ini perlu menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, karena tabungan atau saving adalah sumber utama Investasi. Investasi/*Investment* yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

2.9. Belanja Pemerintah.

Anggaran belanja pemerintah daerah sebagai fungsi desentralisasi dalam pembiayaan pembangunan daerah dipergunakan tepat sasaran dan efisien. Belanja pemerintah/*Governmen spending* sebagai fungsi ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan daerah ditujukan agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagaimana Ekonom Prancis, *Lalumiere* (1989), menyatakan:

"Pengeluaran publik dianggap sebagai sarana intervensi ekonomi dan sosial dan jika mereka terus mendanai tugas-tugas administrasi negara, mereka harus berfungsi baik untuk meningkatkan kapasitas produksi ekonomi (pengeluaran investasi pemerintah) atau redistribusi pendapatan ke banyak pihak yang kurang beruntung (transfer belanja publik). Kita tau lebih kurang 76 % APBD Kabupaten Bungo bersumber dari dana transfer.

Transfer ke daerah memberi implikasi yang luas pada beberapa isu di antaranya pertumbuhan dan pembangunan, pengurangan kemiskinan, pencapaian *Milenium Development Goals*, peningkatan layanan publik, serta stabilitas makroekonomi yang lebih baik (Boex, 2013). Apakah Pemerintah Kabupaten Bungo telah betul-betul mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat/makro ekonomi sebagaimana (Boex,2013) dapat dilihat fokus anggaran belanja Pemerintah yang telah direalisasikan.

Sebagian besar pembiayaan Pembangunan Daerah berasal dari alokasi dana transfer Pemerintah Pusat termasuk Kabupaten Bungo yaitu lebih kurang 76 %. Fiskal Kabupaten Bungo selama lima Tahun terakhir apakah telah digunakan dan berpihak kepada sektor perekonomian ? Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bungo merealisasikan Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 3,82 M. Sementara itu untuk belanja Modal sebesar Rp. 85 M hal ini sangat timpang dan sangat jauh dari semangat untuk perbaikan sektor ekonomi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembelian Kendaraan Dinas dan Perjalanan Dinas, *menurut hemat penulis belanja daerah masih belum komit*

terhadap peningkatan sektor perekonomian daerah berdasarkan alokasi anggaran tersebut.

Selama periode 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Bungo rata-rata belanja barang dan jasa sebesar Rp. 331,4 Milyar dan belanja Modal rata-rata 176, 9 Milyar kecuali pada Tahun 2019 sebesar Rp.234,65 Milyar bila di komparasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada Tahun 2019 jauh lebih tumbuh dibandingkan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, artinya belanja modal dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada belanja barang dan Jasa hal ini perlu untuk dikaji ulang kedepannya jika betul-betul kita ingin membangun daerah ini.

2.10. Proyeksi Perekonomian

Proyeksi ekonomi Kabupaten Bungo akan dapat mengikuti irama Tahun 2024/2025, dari 7 (tujuh) lapangan Usaha (LU) yang melambat pada Tahun 2023 sebagaimana telah dibahas diatas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo 2024 akan berada dikisaran 4,5 % - 5,05 %. Alasannya didasari dari pergerakan PDRB Kabupaten Bungo dua tahun terakhir yang kecenderungan terus melambat, jika tidak ditangani dengan baik dan tepat.

- a. Perekonomian global yang tidak dapat diprediksi, baik Faktor-faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dari eskalasi politik Global dan sebagai dampak bencana alam lokal dan regional.

- b. Tidak ada investasi besar yang banyak menyerap banyak lapangan kerja dan perbaikan harga karet yang signifikan, peningkatan penggalian bahan tambang dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang belum optimal seperti eksploitasi Minyak Bumi, Emas, Biji Besi dan Granit yang tersebar di Kecamatan dalam kabupaten Bungo. Harus diakui tidaklah mudah tetapi itulah tantangan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat Kabupaten Bungo.
- c. Hal lain fiskal pemerintah yang kurang fokus terhadap program yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti memperlancar transportasi dengan peningkatan Infrastruktur jalan produksi ke Kecamatan/Desa, dapat dilihat jalan-jalan menuju kecamatan banyak yang rusak berat, hampir setiap kecamatan. Sementara sektor ini menentukan daya tarik investasi seperti sektor perkebunan dan Industri pengolahan, serta pertambangan. Pemerintah Kabupaten Bungo perlu mengajukan jalan Peningkatan Jalan Provinsi menuju akses Tol sebagai jalan produksi yaitu Jalan Kuawamang Kuning - Betung Bedarah – Simpang Lubuk Kambing – Rengat Riau.

III. KESEMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari paparan di atas ada beberapa kesimpulan penulis bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo selama kurun waktu lima tahun terakhir bertumbuh fluktuatif dan pada kecenderungan yang melambat. Angka pengangguran pada akhir Tahun 2023 yaitu 10.265 atau 5,23 persen dapat dikatakan penurunannya tidak signifikan (*stagnan*) di rata-rata 5 persen kecuali

pada Tahun 2019 sebesar 3,82 persen. Populasi atau tenaga kerja yang besar di Kabupaten Bungo menjadi modal ketika tenaga tersebut dapat bekerja pada profesi yang tepat akan memberikan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah berperan penting memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir (*mainset*) masyarakat atau tenaga kerja daerah ini untuk bagaimana memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam serta teknologi untuk bisa menjadi *oportunity* dan kesempatan kerja, seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan pekerjaan lain yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, sehari-hari. Kepada tenaga kerja produktif untuk tidak selalu berpikir menerima gaji/upah akan tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan yang produktif memberikan *income lebih/ entrepreneurship* melalui Program Pendidikan/pelatihan, Penyuluhan oleh OPD terkait secara *continyu*.

Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah kedepannya menurut penulis adalah sebagai berikut :

- a. Memperlancar transportasi yang menjadi pusat-pusat produksi, terutama jalan-jalan menuju Kecamatan dan Pedesaan/dusun, serta jalan ke perkebunan/pertanian, sehingga efisiensi biaya dan waktu (penghematan biaya produksi), maka produksi lokal dapat kompetitif dengan produksi luar daerah.

- b. Memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bungo dengan memberikan kemudahan akses transportasi, listrik dan sarana komunikasi di area pusat investasi.
- c. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan memberikan kemudahan/bantuan bagi petani untuk mendapatkan Bibit Tanaman Perkebunan yang berkualitas, serta kemudahan mendapatkan Pupuk bersubsidi.
- d. Peningkatan Program UMKM dengan Investasi besar-besaran terhadap pelatihan (peningkatan SDM para pelaku UMKM) utamanya terhadap pasar kerja yang banyak dibutuhkan atau diminati oleh konsumen, bantuan peralatan UMKM serta pendampingan pemasaran, tentunya perlu tenaga-tenaga profesional/ yang ahli dibidangnya. .
- e. Program Ekspolarasi pemanfaatan Sumber Daya Alam, dengan menginventarisir/Pemetaan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Bungo dan mencari Investor.
- f. Pemerintah daerah memperhitungkan potensi-potensi sumber daya lokal dan potensi Kabupaten terdekat untuk dijadikan keuntungan atau nilai tambah ekonomi Kabupaten Bungo dengan fungsi *Aglomerasi* dan fungsi *Grafitasi* (daya tarik ekonomi Ke Kabupaten Bungo), seperti pembangunan pabrik pengolahan *Palm Oil* untuk minyak goreng siap konsumsi di Kabupaten Bungo.

- g. Melalui fiskal pemerintah daerah komitmen terhadap program yang akan meningkatkan perekonomian dengan insentif-insentif dan terobosan investasi, tidak hanya sebagai pendorong seperti ekonom *clasic*, tetapi lebih aktif memberikan sentuhan sebagaimana ekonom-ekonom modern (*Keynesian*) bahwa Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk sebuah negara belum begitu maju.

Muara Bungo, 24 Juni 2024'

Penulis :

Dr. Muslim, S.IP, M.Si

Analisis Kebijakan Kabupaten Bungo &
Tenaga Dosen Ekonomi di Universitas
Muara Bungo

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo 2024

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Badan Pusat Statistik Nasional 2024.

*Boex, V. (2013). The Design of Equalization Grants : Theory and Applications. Grogia State University:
Andrew Young Schoonal l of Policy Studies.*

DJPK Republik Indonesia